



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2020



Alamat :Jl. Bukit Hibul Barat Nanga BulikKabupatenLamandau

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU**

Alamat: Jl. Bukit Hibul Barat Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari Sekretariat dan Bidang-bidang, sekaligus sudah memperhatikan usulan yang disampaikan stakeholder pada saat Musrembang Tingkat Kecamatan dan Musrembang Tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah berpedoman pada Rencana Strategis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau 2018-2023.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 ini, sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan harapan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan ini dapat terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Nanga Bulik, Juli 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamandau,



FRIARAIYATINI, S.KM, M.Kes
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700430 199401 2 004

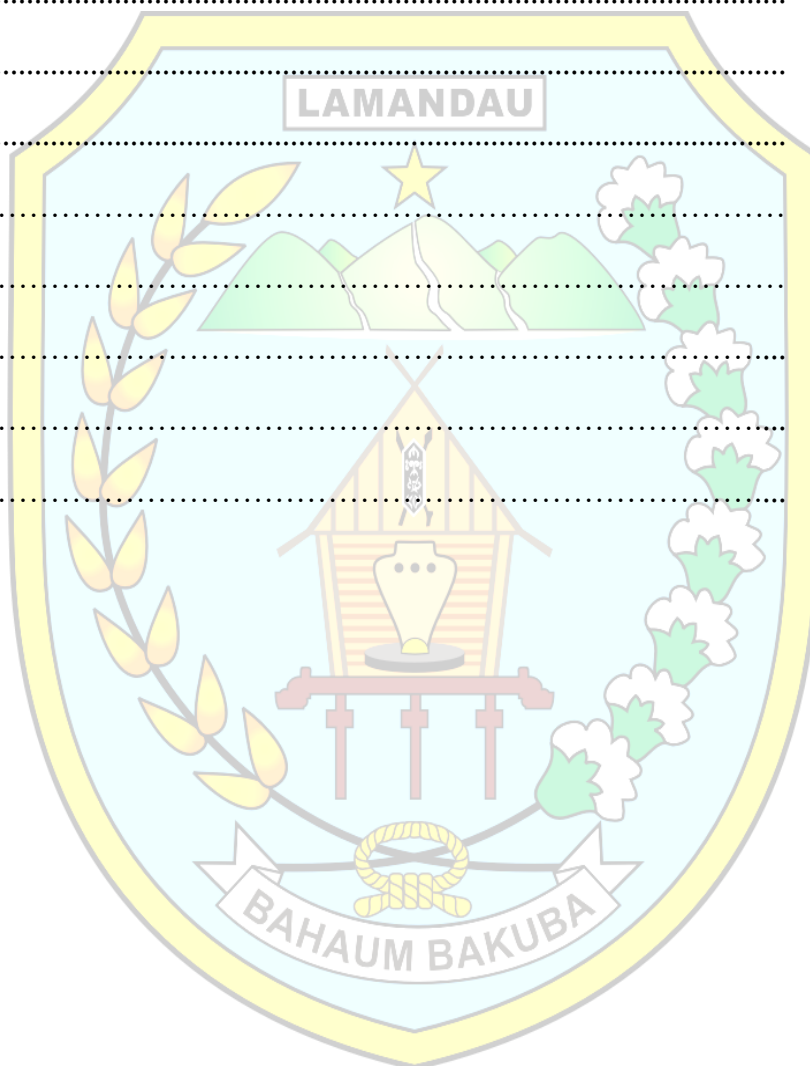
DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra DP3AP2KB.	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB.....	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB	32
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB	33
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB	39
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1.....	9
Tabel 2.2.....	19
Tabel 2.3.....	20
Tabel 2.4.....	26
Tabel 2.5.....	31
Tabel 3.1.....	32
Tabel 3.3.....	36
Tabel 4.1.....	41



DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 1.1 2



DP3AP2KB KABUPATEN

LAMANDAU DP3AP2KB KABUPATEN

BAB I

PENDAHULUAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DP3AP2KB

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

DP3AP2KB KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dokumen rencana tahunan, RENJA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau mempunyai arti strategis dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau mengingat beberapa hal sebagai berikut :

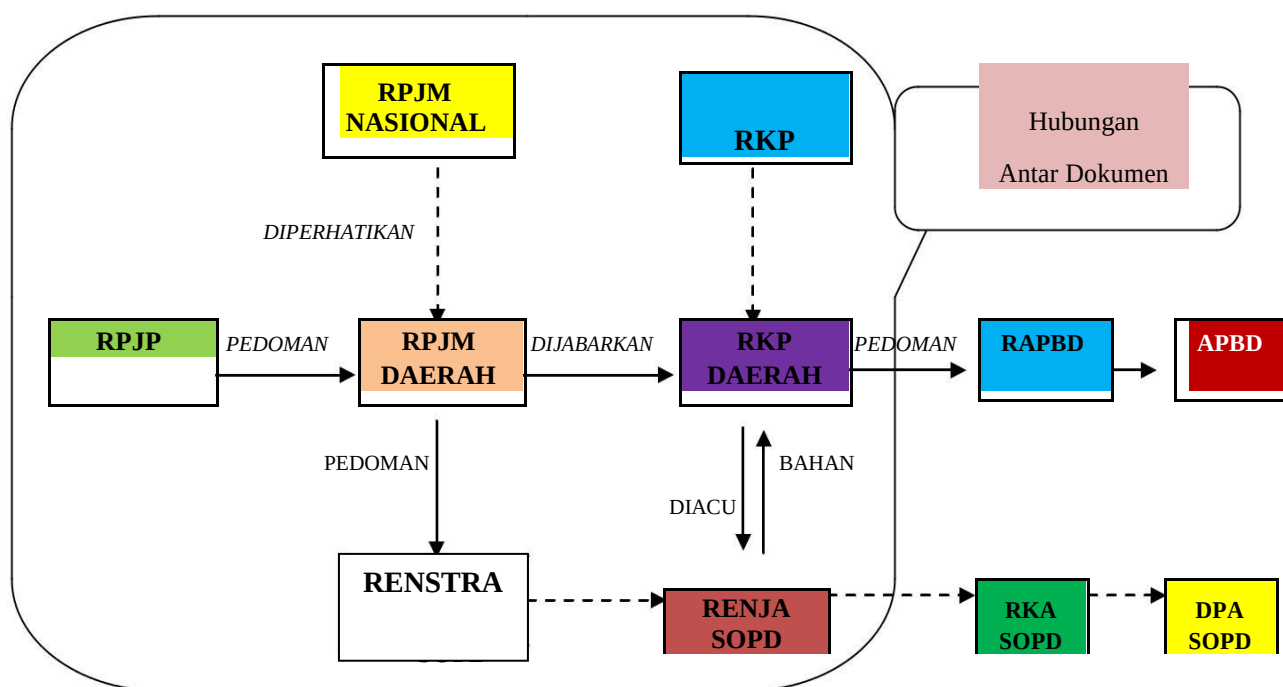
1. RENJA Perubahan SOPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SOPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SOPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA Perubahan SOPD merupakan acuan bagi SOPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021.
3. RENJA Perubahan SOPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SOPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SOPD.

Mengingat arti strategis RENJA Perubahan SOPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Perubahan DP3AP2KB Tahun 2020 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ataupun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1



Gambar keterkaitan antara dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten .

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau DP3AP2KB Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183).
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023;

22. Peraturan Bupati 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 A Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Tanggal 29 Juli 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Perubahan DP3AP2KB Tahun 2020 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DP3AP2KB Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Perubahan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2020 ini adalah:

1. Untuk menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dengan target dan sasaran pembangunan sebagaimana telah diformulasikan dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung pencapaian sasaran pembangunan telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan sistematika penyusunan RENJA Perubahan DP3AP2KB Kabupten Lamandau Tahun 2020 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD 2018-2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SOPD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

DP3AP2KB KABUPATEN

LAMANDAU DP3AP2KB KABUPATEN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DP3AP2KB

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DP3AP2KB

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AP2KB 2018

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DP3AP2KB Kabupaten Lamandau 2019

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2019 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS) sebesar **Rp.2.166.283.331,-** atau 83,78 % dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.412.780.151,-**

b. Belanja Langsung

- Belanja Barang & Jasa

Realisasi Barang & Jasa sebesar **Rp. 4.469.964.922,-** atau 92,41 % dari pagu anggaran sebesar **Rp. 4.837.087.157,-**

- Belanja Hibah

Realisasi Hibah sebesar **Rp. 11.950.000,-** atau 100 % dari pagu anggaran sebesar **Rp. 11.950.000,-**

- Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar **Rp. 1.935.111.000,-** atau 90,71 % dari pagu anggaran sebesar **Rp. 2.007.228.388,-**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA perubahan DP3AP2KB Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SOPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)
Kabupaten Lamandau

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun Anggaran 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Keg Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun yang lalu			Target Prog / Keg Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10 = \frac{5+7}{9}$	$11 = \frac{(10/4)}{}$
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	95,89	100	97,77	100	100	293,66	2,9366
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	100	300	3
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	75,96	100	94,73	94,73	100	270,96	2,7096
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	-	100	93,62	93,62	100	193,62	1,9362
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan	100	86,38	100	97,21	97,21	100	283,59	2,8359
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100	100	100	100	100	100	300	3
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100	99,99	100	100	100	100	299,96	2,9996
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	100	100	100	100	300	3
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	48,33	100	84,54	84,54	100	232,87	2,3287
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	100	100	100	100	100	100	300	3

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi ke luar daerah	100	100	100	100	100	100	300	3
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah	100	100	100	99,78	99,78	100	299,78	2,9978
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	-	100	91,10	91,10	100	191,1	1,911
	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	100	NA	100	NA	NA	100	100	1
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung Kantor, lemari, meja dan kursi	100	100	100	100	100	100	300	3
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100	96,79	100	99,5	99,5	100	296,29	2,9629
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	NA	NA	NA	79,98	79,98	100	179,98	1,7998
	Pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana	Tersedianya Balai Penyuluh Keluarga Berencana	100	96,79	100	99,5	99,5	100	296,29	2,9629
	Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas oprasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas oprasional	100	99,96	100	93,62	93,62	100	293,58	2,9358
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	tersedianya jaminan pemeliharaan gedung kantor	100	100	100	100	100	100	300	3
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	100	100	100	100	100	100	300	3
	Belanja Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya aparatur	100	100	100	100	100	100	300	3
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepatuhan Pegawai	100	99,86	100	100	100	100	299,86	2,9986
	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM/keikutsertaan aparatur dalam diklat fotmal	100	99,86	100	100	100	100	299,86	2,9986

5.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	100	99,48	100	96,79	96,79	100	296,27	2,9627
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya monitoring evaluasi dan pelaporan	100	99,96	100	100	100	100	299,96	2,9996
	Sosialisasi P2WKSS	Terlaksananya sosialisasi P2WKSS	100	NA	100	NA	NA	100	100	1
	Sosialisasi gerakan sayang ibu (GSI)	Tersedianya Sosialisasi gerakan sayang ibu (GSI)	100	NA	100	NA	NA	100	100	1
	Pembinaan Kader GSI	Terslaksananya pembinaan kader GSI	100	NA	100	NA	NA	100	100	1
	Peningkatan peran serta perempuan dan organisasi wanita	Terlaksananya peningkatan peran serta perempuan dan organisasi waita	100	98,5	100	98,28	98,28	100	296,78	2,9678
7.	Program Pelayanan Kontrasespsi	Meningkatnya pelayanan KB aktif	100	99,71	100	99,93	99,93	100	299,64	2,9964
	Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya Pemasangan Kontrasepsi KB	100	99,6	100	99,93	99,93	100	299,53	2,9953
	Pelayanan KB medis operasi	Terlaksananya Pelayanan KB medis operasi	100	100	100	100	100	100	300	3
8.	Program peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase Meningkatnya wawasan remaja terhadap narkoba, PMS dan HIV Aids	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Penyuluhan penanggulangan Narkoba & PMS di sekolah	Terlaksananya Penyuluhan penanggulangan Narkoba & PMS di sekolah	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	fasilitasi pengembangan P2TP2A	100	99,82	100	100	100	100	299,82	2,9982
	Monitoring evaluasi, dan pelaporan	terlaksananya monitoring evaluasi, dan pelaporan	100	99,82	100	NA	NA	100	199,82	1,9982
	Penyusunan data terpilah gender dan anak	terlaksananya Penyusunan data terpilah gender dan anak	100	100	100	NA	NA	100	200	2
	Pembinaan dan pengembangan PUG	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan PUG	100	99,75	100	100	100	100	299,75	2,9975
10.	Program Keluarga Berencana	Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif	100	98,10	100	81,55	81,55	100	279,65	2,7965
	Pelayanan KIE	Telaksananya pelayanan KIE	100	98,14	100	96,59	81,55	100	294,73	2,9473
	pembinaan keluarga berencana	terlaksananya pembinaan keluarga berencana	100	99,5	100	99,91	99,91	100	299,41	2,9941
	pembinaan kelompok KB pria	terlaksananya pembinaan kelompok KB pria	100	98,33	100	NA	NA	100	198,33	1,9833
	Pengelolaan balai penyuluh KB	Terlaksananya Pengelolaan balai penyuluh KB	100	97,63	100	77,48	77,48	100	275,11	2,7511
11.	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Pameran Pembangunan	100	100	100	NA	NA	NA	100	1
	Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten	Telaksananya pameran tingkat kabupaten	100	100	100	NA	NA	NA	100	1

12.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA
	Bina Desa	Telaksananya Bina Desa	100	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program/Kegiatan semua memenuhi target kinerja walaupun secara bertahap
- b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat - Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - Pembangunan gedung kantor
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan Kendaraan dinas operasional
 - Pembangunan balai penyuluh keluarga berencana

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan pelatihan formal
- 5) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- 6) Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan
 - Sosialisasi P2WKSS
 - Pembinaan kader GSI
 - Peningkatan peran serta perempuan dan organisasi wanita
- 7) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
- 8) Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
- 9) Program Penguatan kelembagaan pengharustamaan gender dan anak
 - Monitoring evaluasi, dan pelaporan
 - Penyusunan data terpilah gender dan anak
 - Pembinaan dan pengembangan PUG
- 10) Program keluarga berencana
 - Pelayanan KIE
 - Pembinaan keluarga berencana
 - Pengelolaan balai penyuluh KB
- 11) Program promosi dan kerjasama investasi
 - Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten

- 12) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- Bina desa
- c. Faktor-faktor penyebab tidak ada, karena semua program dan kegiatan terpenuhi secara bertahap
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program kegiatan tidak ada.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tidak ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

Sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, DP3AP2KB Kabupaten Lamandau yang tertuang dalam RENSTRA DP3AP2KB Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023, tujuan, sasaran pembangunan serta Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Adalah berkaitan erat dengan visi/misi kepala daerah tersebut, yaitu misi ke 4.

VISI :

“ Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA “

Penjelasan VISI adalah sebagai berikut :

JUJUR, Mengandung arti makna menjalankan roda pemerintahan dengan amanah, dapat dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, mencintai produk dalam negeri, mengakui fakta sejarah, menjunjung tinggi etologi dan menolak segala bentuk korupsi sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (Good Governance) karena tidak sesuai dengan etologi Pancasila;

UNGGUL, Mengandung arti makna mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan masyarakat yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, terbaik dalam ekonomi, Pendidikan,

Sosial, Budaya, Kesehatan dan terbaik dalam Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya;

ADIL, dimaknai terciptanya kondisi keadilan dalam proses pembangunan, adil terhadap keberadaan hak-hak masyarakat tanpa pembedaan, adil yang juga diartikan sebagai perlindungan menyeluruh bagi masyarakat, serta adil dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

RELEGIUS-Toleran mengandung makna terwujudnya masyarakat yang relegius, bertaqwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi rasa saling hormat –menghormati antar pemeluk agama;

AMAN, situasi yang aman, nyaman, dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat serta mengandung makna bahwa kehidupan sosial bermasyarakat terlindungi dan dalam kondisi suasana kondusif di tiap-tiap sendi kehidupan bermasyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar;

MISI Ke 4 :

- 1. Meningkatkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang bermoral melalui kehidupan beragama dan memfasilitasi penegakan hukum untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang Aman, Tentram, dan Dinamis.**

Gotong Royong merupakan intisari ideology Pancasila, dimana melihat bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa kedepan harus dilakukan secara bahu membahu bersama seluruh komponen untuk ideology bangsa Indonesia ini merupakan pondasi utama dalam proses pembangunan, maka kedepan perlu :

- a. Berdaulat dibidang politik,
- b. Berdikari dibidang ekonomi, dan
- c. Berkpribadian dalam kebudayaan

Agar semangat berbudaya tersebut tetap terjaga, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan semangat gotong royong

- a. Meningkatkan aktifitas semangat gotong royong disemua aspek kehidupan
- b. Meningkatkan nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.

2. Melestariakan seni dan budaya daerah masyarakat Kabupaten Lamandau

- a. Meningkatkan pelestarian budaya daerah dengan melibatkan semua unsur terutama generasi muda
- b. Menjadikan seni dan budaya daerah sebagai alat pemersatu dalam kehidupan sosial di masyarakat, penyangga budaya nasional yang semakin dinamis dan bertumpu pada kekayaan budaya daerah

3. Memfasilitasi kerukunan kehidupan beragama

- a. Memfasilitasi semangat dan kemauan dalam upaya menciptakan kerukunan kehidupan beragama yang optimal
- b. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah
- c. Menciptakan hubungan horizontal antara lembaga-lembaga keagamaan dengan menyelenggarakan dialog rutin/berkala antara pemimpin agama
- d. Peningkatan sarana/prasarana ibadah secara merata dan berkeadilan guna memelihara kerukunan umat beragama yang semakin mantap

1. Meningkatkan kerjasama dan menjalin komunikasi yang baik dengan para tokoh-tokoh

(Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan)

2. Meningkatkan harmonisasi dan rasa tanggung jawab bersama guna menciptakan

3. Kondisi masyarakat yang aman dan dinamis.

Dengan mendukung misi ke-4 Kepala Daerah,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau,terlihat jelas berupaya menambah Programgerakan Emak-emak dan Anak Sejahtera Gerakan (EMAS) Lamandau,dengan berbagai kegiatan diantaranya :

- a. Sosialisasi dan Pembinaan Satgas Penghapusan PKDRT

- b. Peningkatan Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
- c. Penyuluhan Tentang Generasi Berencana (GENRE) dan Pencegahan Perkawinan Anak
- d. Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- e. Peningkatan Kegiatan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- f. Peningkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Analisis kinerja utama DP3AP2KB Kabupaten Lamandau sesuai dengan RENSTRA DP3AP2KB Kabupaten Lamandau merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran Strategis Instansi Pemerintah, yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam capaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan ,Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang bermartabat dan Aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya local		Angka Kriminalitas		258	248	238	228	218	218
2			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	91,97	92,02	92,07	92,17	92,32	92,47
3			Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Ketentraman, Ketertibsn Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00033	0,00030	0,00027	0,00024	0,00021	0,00018
4			Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	1,81	1,74	1,66	1,61	1,55	1,50
6			Persentase Desa/Kelurahan Menuju Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela)	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	NA	5,68	14,77	26,13	40,9	59,21
7			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	14,99	15,8	16,36	16,75	17,63	18,82

Tabel 2.3 (T.C.30)
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB
Kabupaten Lamandau

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,97	92,02	92,07	92,17	92,32	92,47	92,47
Persentase Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,00033	0,00030	0,00027	0,00024	0,00021	0,00018	0,00018
Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	1,81	1,74	1,66	1,61	1,55	1,50	1,50
Persentase desa/kelurahan menuju desa kelurahan layak anak (Dekela)	NA	5,68	14,77	26,13	40,9	59,21	59,21
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14,55	15,8	16,36	16,75	17,63	18,82	18,82

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan permasalahan yang menjadi faktor penghambat terlaksananya program-program kegiatan. Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/kegiatan, karena pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Secara umum permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu bupati dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

Adapun Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 5) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 6) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;

- 7) Perumusan kebijakan operasional ,pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- 8) Perumusan kebijakan operasional ,pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- 9) Perumusan kebijakan operasional,pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,pelatihan ,penelitian dan pengembangan;
- 10) Perumusan kebijakan operasional ,pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,advokasi, penyusunan informasi data;
- 11) Pengelolaan kesekretariatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten lamandau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab;

Kewewenangan:

Adapun kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten,mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1)Penetapan kebijakan daerah,koordinasi, fasilitasi,dan mediasi pelaksanaan kebijakan pengarusamaan gender (PUG) skala kabupaten;
- 2)Koordinasi dan fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- 3)Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala kabupaten;

- 4) Fasilitas pengintegrasian kebijakan pemberdayaan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik skala kabupaten;
- 5) Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten;
- 6) Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
- 7) Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- 8) Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup, bayi dan anak skala kabupaten;
- 9) Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten;
- 10) Penetapan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan dan penembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten;
- 11) Penetapan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jaringan program skala kabupaten;
- 12) Penetapan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) skala kabupaten;
- 13) Penetapan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- 14) Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas, sosial budaya, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan;
- 15) Penyerasian kebijakan kependudukan;

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Pemerataan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan fungsi setiap aparatur, di setiap bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
- 2) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, agar program dan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien.
- 3) Kriteria kelayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan uji kompetensi (*Assessment*) untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan inovasi dan kreatifitas dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1) Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah yang mana sebagai masyarakat ekonomi Asia dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan cara mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan pendidikan, berkompetensi, memiliki sikap inovatif, dan responsif. Serta mampu berpikir dan bertindak secara manajerial, dinamis, taktis, strategis dan sistematis, sehingga daerah dapat berkembang dengan pesat.

2) Peraturan Perundang-undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari pihak pemerintah dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2020, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD DP3AP2KB Tahun 2020
Kabupaten Lamandau

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN (%)	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN (%)	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Rp 659.880.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 457.169.208,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AP2KB	Tersedianya Jasa surat menyurat berupa materai 6000 dan 3000	100 %	4.030.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AP2KB	Tersedianya Jasa surat menyurat berupa materai 6000 dan 3000	100 %	4.030.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik	DP3AP2KB	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 %	61.200.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik	DP3AP2KB	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 %	61.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DP3AP2KB	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100 %	79.422.384,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DP3AP2KB	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100 %	84.169.800,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 %	50.120.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 %	53.987.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	72.957.616,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	28.340.476,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP3AP2KB	Tersedianya jasa cetak penggandaan	100 %	38.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP3AP2KB	Tersedianya jasa cetak penggandaan	100 %	32.050.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DP3AP2KB	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	100 %	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DP3AP2KB	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	100 %	32.000.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	DP3AP2KB	Tersedianya makanan dan minuman	100 %	60.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	DP3AP2KB	Tersedianya makanan dan minuman	100 %	23.992.500,00	
	Rapat-rapat	DP3AP2KB	Terlaksananya	100 %	171.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan	DP3AP2KB	Terlaksananya	100 %	54.249.432,00	

	Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		rapat-rapat koordinasi keluar daerah			Konsultasi keluar Daerah		rapat-rapat koordinasi keluar daerah			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	DP3AP2KB	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100 %	83.150.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	DP3AP2KB	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100 %	83.150.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		928.496.700,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		608.074.720,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 %	89.537.500,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 %	25.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya peralatan gedung kantor	100 %	42.959.200,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DP3AP2KB	Tersedianya peralatan gedung kantor	100 %	7.500.000,00	
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	DP3AP2KB	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala/berkala gedung kantor	100 %	7.600.000,00	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	DP3AP2KB	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala/berkala gedung kantor	100 %	3.285.000,00	
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	DP3AP2KB	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100 %	66.900.000,00	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	DP3AP2KB	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100 %	103.500.000,00	
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	DP3AP2KB	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 %	20.500.000,00	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	DP3AP2KB	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 %	11.500.000,00	
	Pembangunan sekretariat P2TP2A PUSPAGA dan forum anak	DP3AP2KB	Tersedianya sekretariat P2TP2A, PUSPAGA dan forum anak	101 %	450.000.000,00	Pembangunan sekretariat P2TP2A PUSPAGA dan forum anak	DP3AP2KB	Tersedianya sekretariat P2TP2A, PUSPAGA dan forum anak	101 %	450.000.000,00	
	Pembuatan Pagar atau gapura	DP3AP2KB	Tersedianya gapura dan pagar	100 %	195.000.000,00	Pembuatan Pagar atau gapura	DP3AP2KB	Tersedianya gapura dan pagar	100 %	7.289.720,00	
	Penataan halaman kantor	DP3AP2KB	Tersedianya [enataan halaman kantor	100 %	56.000.000,00	Penataan halaman kantor	DP3AP2KB	Tersedianya [enataan halaman kantor	100 %	0,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat Disiplin aparatur		70.000.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat Disiplin aparatur		0,00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DP3AP2KB	Tersedianya pakaian dinas aparatur	100 %	70.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DP3AP2KB	Tersedianya pakaian dinas aparatur		0,00	

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		50.120.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		29.270.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DP3AP2KB	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal (pendidikan dan pelatihan)	100 %	50.120.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	29.270.000,00	
5	Program Keseharian Kebijakan Peningkatan kualitas anak		Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak ank		458.588.213,00	Program Keseharian Kebijakan Peningkatan kualitas anak		Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak ank		180.708.571,00	
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	DP3AP2KB	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekela)	100%	418.588.213,00	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	DP3AP2KB	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekela)	100%	166.814.221,00	
	Penyusunan Data Terpilah Gender	DP3AP2KB	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekela)	100%	40.000.000,00	Penyusunan Data Terpilah Gender	DP3AP2KB	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekela)	100%	13.894.350,00	
6	Program Penguatan Pengharustamaan gender		Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan penganggaran responsif gender)		689.331.300,00	Program Penguatan Pengharustamaan gender		Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan penganggaran responsif gender)		436.430.681,00	
	Peningkatan Kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan	DP3AP2KB	Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	100 Persen	456.200.000,00	Peningkatan Kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan	DP3AP2KB	Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	100 Persen	266.117.641,00	
	Sosialisasi dan peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender	DP3AP2KB	Persentase partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan	100 persen	83.131.300,00	Sosialisasi dan peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender	DP3AP2KB	Persentase partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan	100 persen	36.158.283,00	

	Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	DP3AP2KB	Persentase Penurunan jumlah kasus dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 Persen	150.000.000,00	Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	DP3AP2KB	Persentase Penurunan jumlah kasus dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 Persen	134.154.757,00	
7	Program kependudukan dan keluarga berencana		Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK		509.372.000,00	Program kependudukan dan keluarga berencana		Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK		413.285.000,00	
	Pelayanan KIE	DP3AP2KB	Rata-rata Pertumbuhan penduduk pertahun	100%	469.372.000,00	Pelayanan KIE	DP3AP2KB	Rata-rata Pertumbuhan penduduk pertahun	100%	413.285.000,00	
	Grand Desain pengendalian Kualitas penduduk Kabupaten Lamandau	DP3AP2KB	Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	100%	40.000.000,00	Grand Desain pengendalian Kualitas penduduk Kabupaten Lamandau	DP3AP2KB	Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	100%	0,00	
8	Program Pelayanan Kontrasepsi		Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB		305.600.000,00	Program Pelayanan Kontrasepsi		Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB		116.437.897,00	
	Pelayanan Kontrasepsi KB	DP3AP2KB	Jumlah pelayanan kontrasepsi KB	100%	145.600.000,00	Pelayanan Kontrasepsi KB	DP3AP2KB	Jumlah pelayanan kontrasepsi KB	100%	87.360.249,00	
	Peningkatan Poktan (BKB, BKR, BKL)	DP3AP2KB	Jumlah Peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	100%	60.000.000,00	Peningkatan Poktan (BKB, BKR, BKL)	DP3AP2KB	Jumlah Peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	100%	11.697.148,00	
	Penyuluhan tentang generasi berencana (GENRE) dan pencegahan dan perkawinan anak	DP3AP2KB	Jumlah sekolah yang mengikuti penyuluhan tentang GenRe	100%	40.000.000,00	Penyuluhan tentang generasi berencana (GENRE) dan pencegahan dan perkawinan anak	DP3AP2KB	Jumlah sekolah yang mengikuti penyuluhan tentang GenRe	100%	7.963.200,00	
	Pembinaan keluarga berencana	DP3AP2KB	Jumlah pokja kampung KB yang dibina	100%	60.000.000,00	Pembinaan keluarga berencana	DP3AP2KB	Jumlah pokja kampung KB yang dibina	100%	9.417.300,00	
9	Program Peningkatan Balai Penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga (DAK Fisik dan Non Fisik)		Persentase peningkatan balai penyuluh KB dan pembangunan keluarga		3.359.868.000,00	Program Peningkatan Balai Penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga (DAK Fisik dan Non Fisik)		Persentase peningkatan balai penyuluh KB dan pembangunan keluarga		3.359.868.000,00	

	Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan kader IMP	DP3AP2KB	Jumlah PKB/PLKB dankader IMP	100%	31.800.000,00	Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan kader IMP	DP3AP2KB	Jumlah PKB/PLKB dankader IMP	100%	31.800.000,00	
	Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon	DP3AP2KB	Jumlah sarana prasarana balai penyuluh KB gudang alokon	100%	1.200.000,00	Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon	DP3AP2KB	Jumlah sarana prasarana balai penyuluh KB gudang alokon	100%	1.200.000,00	
	Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan gudang alokon	DP3AP2KB	Jumlah pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB	100%	250.000.000,00	Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan gudang alokon	DP3AP2KB	Jumlah pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB	100%	267.500.000,00	
	Peningkatan Pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	DP3AP2KB	Jumlah bulan pengelolaan balai penyuluh KB dan kampung KB	100%	2.400.088.000,00	Peningkatan Pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	DP3AP2KB	Jumlah bulan pengelolaan balai penyuluh KB dan kampung KB	100%	2.209.368.000,00	
	Pengadaan Mobil Unit Penerangan	DP3AP2KB	Jumlah sarana prasarana klinik KB	100%	850.000.000,00	Pengadaan Mobil Unit Penerangan	DP3AP2K	Jumlah sarana prasarana klinik KB	100%	850.000.000,00	

➤ **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diutamakan yang merupakan unsur-unsur yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Lamandau. Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan atau tidak ada, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Lamandau

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DP3AP2KB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Propinsi yang terkait erat dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No.	Kebijakan Nasional /Propinsi	Sumber
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	Renstra BkkbN
2	Angka kelahiran total (TFR)	Renstra BkkbN
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Renstra BkkbN
4	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi(unmet need)	Renstra BkkbN
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)	Renstra BkkbN
6	Pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak	Renstra Kemen PPPA
7	Pemerintah daerah yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak	Renstra Kemen PPPA
8	Kabupaten Layak anak	Renstra Kemen PPPA
9	Pemerintah daerah yang menerapkan sistem data terpilah gender dan anak	Renstra Kemen PPPA
10	Gran desain kependudukan	Renstra BkkbN
11	Sarasehan kampung KB	Renstra BkkbN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan DP3AP2KB

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DP3AP2KB. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

A. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan

VISI : "Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA : (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)"				
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, Religius dan Aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Bermartabat dan Aman Berdasarkan Nilai-nilai dan Kearifan Budaya	1) Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan 2) Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	1) Melaksanakan review, Koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan 2) Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan dan Lintas Sektor 3) Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, sinkron	1) Penyusunan Program dan Kegiatan yang responsif Gender 2) Penyusunan Program yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan

	Lokal	Masyarakat 3) Meningkatnya Pengendalian Penduduk 4) Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak 5) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana	dan sinergi antara pemangku kepentingan 4) Meningkatkan Pemantuan ,analisis ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 5) Meningkatkan Kualitas Layanan Pengaduan Masyarakat terkait PPA 6) Meningkatnya Hak Sipil dan Kebebasan 7) Meningkatnya Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif 8) Meningkatnya Kesehatan dan Kesejahteraan 9) Meningkatnya Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang, dan kegiatan budaya 10) Meningkatnya Perlindungan Khusus	3) Membangun Jejaring Kelembagaan PUG 4) Protap Penyelenggara Peningkatan Kualitas Perempuan. 5) Meningkatkan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan termasuk TPPO 6) Sosialisasi kemasyarakatan Kabupaten Lamandau tentang Program KB 7) Penyusunan Program yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (KB) 8) Peningkatan kerjasama dengan semua fasilitas kesehatan 9) Protap penyelenggara n peningkatan pelayanan KB
--	-------	---	--	---

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut fungsinya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau adalah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, perlindungan anak dan data, pengendalian penduduk, penyuluhan penggerakan, dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2021 yang terdiri dari 4 (empat) Program Prioritas, 5 (lima) Program Penunjang, dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan.

Rencana Kerja perubahan Program/Kegiatan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2020, seperti yang tercantum dalam tabel 3.3 (T-C.33) sebagai berikut:

Tabel 3.3 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DP3AP2KB Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Nama SOPD : DP3AP2KB Kabupaten Lamandau

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Rancangan Awal RKPD				Ctt Ptg	Prakiraan maju rencana tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DP3AP2KB	100%	457.169.208,00	APBD		100%	906.823.771
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat berupa materai 6000 dan 3000	DP3AP2KB	700.00 lembar	4.030.000,00	APBD		700.00 lembar	5.125.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	DP3AP2KB	12Bulan	61.200.000,00	APBD		12 Bulan	71.750.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DP3AP2KB	12 Bulan	84.169.800,00	APBD		12 Bulan	108.952.711
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DP3AP2KB	12 Bulan	53.987.000,00	APBD		12 Bulan	72.842.650
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DP3AP2KB	12 Bulan	28.340.476,00	APBD		12 Bulan	91.578.410
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa cetak penggandaan	DP3AP2KB	12 Bulan	32.050.000,00	APBD		12 Bulan	46.125.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	DP3AP2KB	12 Bulan	32.000.000,00	APBD		12 Bulan	51.250.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DP3AP2KB	12 Bulan	23.992.500,00	APBD		12 Bulan	66.625.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	DP3AP2KB	12 Bulan	54.249.432,00	APBD		12 Bulan	230.625.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DP3AP2KB	12 Bulan	83.150.000,00	APBD		12 Bulan	161.950.000

02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	DP3AP2KB	100	608.074.720,00	APBD		100	743.124.667
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	DP3AP2KB	1 paket	25.000.000,00	APBD		1 Paket	97.375.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DP3AP2KB	1 paket	7.500.000,00	APBD		1 Paket	174.250.000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala/berkala gedung kantor	DP3AP2KB	1 paket	3.285.000,00	APBD		1 Paket	15.374.667
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	DP3AP2KB	8 unit	103.500.000,00	APBD		1 Paket	112.750.000
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DP3AP2KB	12 bulan	11.500.000,00	APBD		1 Paket	20.500.000
	Pembangunan sekretariat P2TP2A PUSPAGA dan forum anak	Tersedianya sekretariat P2TP2A, PUSPAGA dan forum anak	DP3AP2KB	1 paket	450.000.000,00	APBD		1 Paket	0
	Pembuatan Pagar atau gapura	Tersedianya gapura dan pagar	DP3AP2KB	1 paket	7.289.720,00	APBD		1 Paket	102.500.000
	Penataan halaman kantor	Tersedianya penataan halaman kantor	DP3AP2KB	1 paket	0,00	APBD		1 Paket	97.375.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin aparatur	DP3AP2KB	100	0,00	APBD		1 Paket	71.750.001
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur	DP3AP2KB	100	0,00	APBD		100	71.750.001
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	DP3AP2KB	100	29.270.000,00	APBD		100	123.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal (pendidikan dan pelatihan)	DP3AP2KB	100	29.270.000,00	APBD		100	123.000.000
05	Program Keseharian Kebijakan Peningkatan kualitas anak	Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	DP3AP2KB	14,77	180.708.571,00	APBD		100	287.000.000

	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekela)	DP3AP2KB	13 Desa	166.814.221,00	APBD		26,13	256.250.000
	Penyusunan Data Terpilah Gender	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekela)	DP3AP2KB	1 dokumen	13.894.350,00	APBD		23 Desa	30.750.000
06	Program Penguatan Pengharustamaan gender	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan penganggaran responsif gender)	DP3AP2KB	20	436.430.681,00	APBD		10 Konseling	806.993.178
	Peningkatan Kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	DP3AP2KB	5 organisasi perempuan	266.117.641,00	APBD		1 dokumen	538.796.589
	Sosialisasi dan peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender	Persentase partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan	DP3AP2KB	1 sosialisasi	83.131.300,00	APBD		40	114.446.589
	Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Persentase Penurunan jumlah kasus dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP3AP2KB	25 pembinaan /pendamping 1 sosialisasi	150.000.000,00	APBD		5 organisasi perempuan	153.750.000
07	Program kependudukan dan keluarga berencana	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK	DP3AP2KB	100	413.285.000,00	APBD		1 sosialisasi	527.231.300
	Pelayanan KIE	Rata-rata Pertumbuhan penduduk pertahun	DP3AP2KB	16 Desa	413.285.000,00	APBD		1 sosialisasi	481.106.300
	Grand Desain pengendalian Kualitas penduduk Kabupaten Lamandau	Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	DP3AP2KB	1 Dokumen	0,00	APBD		25 pembinaan /pendamping	46.125.000

08	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	DP3AP2KB	100	116.437.897,00	APBD		100	116.437.897
	Pelayanan Kontrasepsi KB	Jumlah pelayanan kontrasepsi KB	DP3AP2KB	20 Kali	87.360.249,00	APBD		16 desa	87.360.249
	Peningkatan Poktan (BKB, BKR, BKL)	Jumlah Peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	DP3AP2KB	10 Poktan	11.697.148,00	APBD		22 Kader	11.697.148
	Penyuluhan tentang generasi berencana (GENRE) dan pencegahan dan perkawinan anak	Jumlah sekolah yang mengikuti penyuluhan tentang GenRe	DP3AP2KB	20 Sekolah	7.963.200,00	APBD		20 PLKB	7.963.200
	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah pokja kampung KB yang dibina	DP3AP2KB	6 Pokja	9.417.300,00	APBD		1 Dokumen	9.417.300
09	Program Peningkatan Balai Penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga (DAK Fisik dan Non Fisik)	Persentase peningkatan balai penyuluh KB dan pembangunan keluarga	DP3AP2KB	100	3.359.868.000,00	APBD		100	3.621.415.200
	Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan kader IMP	Jumlah PKB/PLKB dankader IMP	DP3AP2KB	36 Orang	31.800.000,00	APBD		20 kali	95.837.500
	Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon	Jumlah sarana prasarana balai penyuluh KB gudang alokon	DP3AP2KB	6 set	1.200.000,00	APBD		10 poktan	450.487.500
	Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan gudang alokon	Jumlah pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB	DP3AP2KB	3 paket	267.500.000,00	APBD		8 kelompok	615.000.000
	Peningkatan Pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	Jumlah bulan pengelolaan balai penyuluh KB dan kampung KB	DP3AP2KB	12 bulan	2.209.368.000,00	APBD		20 sekolah	2.460.090.200
	Pengadaan Mobil Unit Penerangan	Jumlah sarana prasarana klinik KB	DP3AP2KB	1 paket	850.000.000,00	APBD		5 Pokja	3.621.415.200

DP3AP2KB KABUPATEN

LAMANDAU DP3AP2KB KABUPATEN

BAB IV

**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN
PENDANAAN RENCANA KERJA
DP3AP2KB**

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DP3AP2KB

Rencana Kerja (RENJA) perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah 2020. Dengan rencana kerja yg terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Adapun rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan DP3AP2KB

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	2020		2021		Sumber Dana
			Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	457.169.208,00	100%	Rp 906.823.771	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat berupa materai 6000 dan 3000	700.00 lembar	4.030.000,00	700.00 lembar	Rp 5.125.000,	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12Bulan	61.200.000,00	12Bulan	Rp 71.750.000	APBD
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	84.169.800,00	12 Bulan	Rp 108.952.711	APBD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	53.987.000,00	12 Bulan	Rp 72.842.650	APBD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	28.340.476,00	12 Bulan	Rp 91.578.410	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa cetak penggandaan	12 Bulan	32.050.000,00	12 Bulan	Rp 46.125.000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	12 Bulan	32.000.000,00	12 Bulan	Rp 51.250.000	APBD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	23.992.500,00	12 Bulan	Rp 66.625.000	APBD

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12 Bulan	54.249.432,00	12 Bulan	Rp 230.625.000	APBD
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	83.150.000,00	12 Bulan	Rp 161.950.000	APBD
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	608.074.720,00	100	Rp 743.124.667	APBD
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	25.000.000,00	1 paket	Rp 97.375.000	APBD
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	7.500.000,00	1 paket	Rp 174.250.000	APBD
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala/berkala gedung kantor	1 paket	3.285.000,00	1 paket	Rp 15.374.667	APBD
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	8 unit	103.500.000,00	8 unit	Rp 112.750.000	APBD
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	11.500.000,00	12 bulan	Rp 20.500.000	APBD
	Pembangunan sekretarian P2TP2A PUSPAGA dan forum anak	Tersedianya sekretariat P2TP2A,PUSPAGA dan forum anak	1 paket	450.000.000,00	1 paket	Rp 0	APBD
	Pembuatan Pagar atau gapura	Tersedianya gapura dan pagar	1 paket	7.289.720,00	1 paket	Rp 102.500.000	APBD
	Penataan halaman kantor	Tersedianya [enataan halaman kantor	1 paket	0,00	1 paket	Rp 97.375.000	APBD

03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Displin aparaturnya	100	0,00	100	Rp 71.750.001	APBD
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparaturnya	100	0,00	100	Rp 71.750.001	APBD
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	29.270.000,00	100	Rp 123.000.000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparaturnya dalam diklat formal (pendidikan dan pelatihan)	100	29.270.000,00	100	Rp 123.000.000	APBD
05	Program Keseharian Kebijakan Peningkatan kualitas anak	Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	14,77	180.708.571,00	14,77	Rp 287.000.000	APBD
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekel)	13 Desa	166.814.221,00	13 Desa	Rp 256.250.000	APBD
	Penyusunan Data Terpilah Gender	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak(Dekel)	1 dokumen	13.894.350,00	1 dokumen	Rp 30.750.000	APBD
06	Program Penguatan Pengharustamaan gender	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan penganggaran responsif gender)	20	436.430.681,00	20	Rp 806.993.178	APBD
	Peningkatan Kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	5 organisasi perempuan	266.117.641,00	5 organisasi perempuan	Rp 538.796.589	APBD
	Sosialisasi dan peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender	Persentase partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan	1 sosialisasi	83.131.300,00	1 sosialisasi	Rp 114.446.589	APBD
	Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Persentase Penurunan jumlah kasus dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	25 pembinaan /pendamping 1 sosialisasi	150.000.000,00	25 pembinaan /pendamping 1 sosialisasi	Rp 153.750.000	APBD

07	Program kependudukan dan keluarga berencana	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK	100	413.285.000,00	100	Rp 527.231.300	APBD
	Pelayanan KIE	Rata-rata Pertumbuhan penduduk pertahun	16 Desa	413.285.000,00	16 Desa	Rp 481.106.300	APBD
	Grand Desain pengendalian Kualitas penduduk Kabupaten Lamandau	Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	Rp 46.125.000	APBD
08	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	100	116.437.897,00	100	Rp 297.250.000	APBD
	Pelayanan Kontrasepsi KB	Jumlah pelayanan kontrasepsi KB	20 Kali	87.360.249,00	20 Kali	Rp 76.875.000	APBD
	Peningkatan Poktan (BKB, BKR, BKL)	Jumlah Peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	10 Poktan	11.697.148,00	10 Poktan	Rp 76.875.000	APBD
	Penyuluhan tentang generasi berencana (GENRE) dan pencegahan dan perkawinan anak	Jumlah sekolah yang mengikuti penyuluhan tentang GenRe	20 Sekolah	7.963.200,00	20 Sekolah	Rp 66.625.000	APBD
	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah pokja kampung KB yang dibina	6 Pokja	9.417.300,00	6 Pokja	Rp 76.875.000	APBD
09	Program Peningkatan Balai Penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga (DAK Fisik dan Non Fisik)	Persentase peningkatan balai penyuluh KB dan pembangunan keluarga	100	3.359.868.000,00	100	Rp 3.621.415.200	APBD
	Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan kader IMP	Jumlah PKB/PLKB dankader IMP	36 Orang	31.800.000,00	36 Orang	Rp 95.837.500	APBD

	Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon	Jumlah sarana prasarana balai penyuluh KB gudang alokon	6 set	1.200.000,00	6 set	Rp 450.487.500	APBD
	Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan gudang alokon	Jumlah pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB	3 paket	267.500.000,00	3 paket	Rp 615.000.000	APBD
	Peningkatan Pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	Jumlah bulan pengelolaan balai penyuluh KB dan kampung KB	12 bulan	2.209.368.000,00	12 bulan	Rp 2.460.090.200	APBD
	Pengadaan Mobil Unit Penerangan	Jumlah sarana prasarana klinik KB	1 paket	850.000.000,00	1 paket	Rp 3.621.415.200	APBD

DP3AP2KB KABUPATEN

LAMANDAU DP3AP2KB KABUPATEN

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan anggaran 2020. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau menginginkan perencanaan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja untuk semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) DP3AP2KB berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan –kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja (RENJA) perubahan merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana RENJA Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA).
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Maka seluruh ASN DP3AP2KB secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA perubahan Tahun 2020.

4. Adapun dasar Tata Cara Penyusunan RENJA perubahan Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja perubahan Satuan Organisasi perangkat Daerah (Renja SOPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2020 ini, adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamandau,



FRIARAIYATINI, SKM, M.Kes

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700430 199401 2 004

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikat or Kinerj a						Pagu Indikatif	Prakira an Maju	Keteran gan	
					Hasil Progra m		Kelua ran Kegia tan		Hasil Kegiata n				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Targe t	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR													
2.02.01	DP3AP2KB													
											Rp 10.013.955.750,00	Rp 10.264.304. 643,75		
	Belanja Tidak Langsung										Rp 2.809.479.537,00	Rp 2.879.716.5 25,43		
	Belanja Langsung										Rp 7.204.476.213,00	Rp 7.384.588.1 18,33		
1.01.1.01.0101.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah										Rp 884.706.119,00	Rp 906.823.771 ,98		

1.01.1.01.0101.01.00 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretar iatan	100 %	Materai yang dipergu nakan (Lembar)	16800:00 :00	Tersedianya materai kantor	1260:00: 00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.125.000,0 0	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.00 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretar iatan	100 %	Jumlah Layanan jasa yang ditangg ung (Jenis)	3.00	Tersedianya layanan jasa kantor	3.00	Rp 70.000.000,00	Rp 71.750.000, 00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.00 5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretar iatan	100 %	Jumlah THL Adminis trasi (Orang)	171:00:00	Tersedianya dana untuk membayar gaji THL	171:00:00	Rp 106.295.328,00	Rp 108.952.711 ,20	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.00 6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretar iatan	100 %	Jumlah Ruang yang terjaga kebersih annya	24:00:00	Terjaganya kebersihan kantor	24:00:00	Rp 71.066.000,00	Rp 72.842.650, 00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.00 8	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretar iatan	100 %	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Dinas (Jenis)	70:00:00	tersedianya alat tulis kantor	70:00:00	Rp 89.344.791,00	Rp 91.578.410, 78	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.00 9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretar iatan	100 %	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggan daan	06:00	tersedianya cetak penggandaan	06:00	Rp 45.000.000,00	Rp 46.125.000, 00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan

1.01.1.01.0101.01.01 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (Bahan)	10:00	tersedianya bahan bacaan kantor	10:00	Rp 50.000.000,00	Rp 51.250.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.01 3	Penyediaan Makanan dan Minuman			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (jenis)	02:00	tersedianya makanan dan minuman kantor	02:00	Rp 65.000.000,00	Rp 66.625.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.014	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah DP3AP2KB (surat)	80:00:00	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80:00:00	Rp 225.000.000,00	Rp 230.625.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.01.01 5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah Dp3ap2kb	150:00:00	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150:00:00	Rp 158.000.000,00	Rp 161.950.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										Rp 724.999.676,00	Rp 743.124.667,90		

2.02.2.02.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah Perlengkapan gedung kantor /jenis	05:00	tersedianya perlengkapan gedung kantor	05:00	Rp 95.000.000,00	Rp 97.375.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah Peralatan gedung kantor /jenis	04:00	tersedianya peralatan gedung kantor	04:00	Rp 170.000.000,00	Rp 174.250.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	05:00	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	05:00	Rp 14.999.676,00	Rp 15.374.667,90	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	20:00	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	20:00	Rp 110.000.000,00	Rp 112.750.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah Perlengkapan yang dipelihara (Unit)	22.00	Tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor	22.00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.500.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
	Pengadaan Kendaraan dinas roda 2			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	101 %	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (unit)	06:00	Tersedianya kendaraan dinas roda 2	06:00	Rp 120.000.000,00	Rp 123.000.000,00	DP3AP2KB	2021
2.02.2.02.01.02.56	Pembuatan Pagar atau gapura			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah pagar atau gapura (paket)	01.00	Tersedianya Pagar dan gapura	01.00	Rp 100.000.000,00	Rp 102.500.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan

2.02.2.02.01.02.64	Penataan halaman kantor			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah halaman kantor yang ditata (paket)	1.00	tersedianya penataan halaman kantor	1.00	Rp 95.000.000,00	Rp 97.375.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										Rp 70.000.001,00	Rp 71.750.001,03		
2.02.2.02.01.03.02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	102 %	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (paket)	1:01	Tersedianya Pakaian dinas aparatur	02:00	Rp 70.000.001,00	Rp 71.750.001,03	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.01.1.01.0101.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Rp 120.000.000,00	Rp 123.000.000,00		
1.01.1.01.0101.05	Pendidikan dan Pelatihan Formal			DP3AP2KB	Cakupan pelayanan kesekretariatan	100 %	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	5.00	terlatihnya SDM sekolah dan	5.00	120.000.000,00	Rp 123.000.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
1.02.2.02.01.15	Program Keseharian Kebijakan Peningkatan kualitas anak										Rp 280.000.000,00	Rp 287.000.000,00		
2.02.2.02.01.15.08	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase Desa/kelurahan menuju desa/kelurahan	100%	Jumlah Desa atau Kelurahan Menuju Dekelara	26,13	Jumlah desa/ kelurahan yang sudah diinisiasi	26,13	Rp 250.000.000,00	Rp 256.250.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan

					layak anak(Deke la)									
2.02.2.02.01.15.16	Penyusunan Data Terpilah Gender	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase Desa/kelu rahan menuju desa/kelu rahan layak anak(Deke la)	100%	Jumlah dokume n data terpilah gender dan anak	1.00	Tersedianya buku data terpilah gender dan anak	1.00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.750.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.02.2.0201.19	Program Penguatan Pengharustamaa n gender										Rp 787.310.418,00	Rp 806.993.178,45		
2.02.2.02.01.19.11	Peningkatan Kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Indeks Pembang unan Gender (IPG)	100 Persen	Jumlah Organis asi Wanira (volume)	92 17	Terlaksanan ya kegiatan organisasi perempuan dalam pemberday aan dan pembangun an	92 17	Rp 525.655.209,00	Rp 538.796.589,23	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.19.15	Sosialisasi dan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Indeks Pembang unan Gender (IPG)	101 Persen	Jumlah sosialis asi kesetara an dan keadilan gender (kecama tan)	8	Terlaksanan ya kegiatan sosialisasi Kesetaraan dan keadilan gender	8	Rp 111.655.209,00	Rp 114.446.589,23	DP3AP2KB	Sedang Berjalan

2.02.2.02.01.19.16	Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase Penurunan jumlah kasus dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 Persen	Jumlah Pembinaan dan pembangunan	24	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan	24	Rp 150.000.000,00	Rp 153.750.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.15	Program Pelayanan Kontrasepsi										Rp 290.000.000,00	Rp 297.250.000,00		
2.08.2.02.01.15.02	Pelayanan Kontrasepsi KB	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase pengguna Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100 Persen	Jumlah Pelayanan Kontrasepsi KB	16 ,75	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi kb	16 , 75	Rp 75.000.000,00	Rp 76.875.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.15.05	Peningkatan Poktan (BKB, BKR, BKL)	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase pengguna Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100 Persen	Jumlah Poktan yang dibina	10	Terlaksananya Peningkatan poktan tumbuh ke berkembang	10	Rp 75.000.000,00	Rp 76.875.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.15.09	Penyuluhan tentang generasi berencana (GENRE) dan pencegahan dan perkawinan anak	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase pengguna Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100 Persen	Jumlah sekolah yang mengikuti penyuluhan genre	20	Terlaksananya sekolah yang mengikuti penyuluhan tentang GenRe	20	Rp 65.000.000,00	Rp 66.625.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.15.10	Pembinaan keluarga berencana	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase pengguna Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100 Persen	Jumlah pokja KB yang dibina	6	Terlaksananya pokja kampung KB yang dibina	6	Rp 75.000.000,00	Rp 76.875.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan

2.08.2.02.01.16	Program kependudukan dan keluarga berencana										Rp 514.372.000,00	Rp 527.231.300,00		
2.08.2.02.01.16.02	Pelayanan KIE	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Rata-rata Pertumbuhan penduduk pertahun	100 Persen	Jumlah Partisipasi PUS dalam pemakaian alat kontrasepsi/ber KB (desa)	1, 61	Terlaksananya Partisipasi PUS dalam pemakaian alat kontrasepsi/ber KB	1, 61	Rp 469.372.000,00	Rp 481.106.300,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.16.16	Grand Desain pengendalian Kualitas penduduk Kabupaten Lamandau	Prioritas Kab. Lamandau	Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Rata-rata Pertumbuhan penduduk pertahun	100 Persen	Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau (kali)	1	Tersusunnya dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	1	Rp 45.000.000,00	Rp 46.125.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.17	Program Peningkatan Balai Penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga (DAK Fisik dan Non Fisik)										Rp 3.533.088.000,00	Rp 3.621.415.200,00		
2.08.2.02.01.18	Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB dan kader IMP		Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase Peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	100%	Jumlah PKB/PLKB dan Kader IMP (Orang)	36	Terpenuhinya sarana kerja PKB/PLKB dan Kader IMP	36	Rp 93.500.000,00	Rp 95.837.500,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan

2.08.2.02.01.19	Pengadaan sarana prasarana balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon		Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase Peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	100%	Jumlah sarana dan prasarana Balai penyuluh keluarga berencana dan gudang alokon (set)	6	Terlaksananya sarana dan prasarana balai penyuluh KB dan gudang alokon	6	Rp 439.500.000,00	Rp 450.487.500,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.20	Pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB dan gudang alokon		Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase Peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	100%	Jumlah pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB (paket)	03:00:00	Terlaksananya pembangunan pagar (alih fungsi) balai penyuluh KB	3	Rp 600.000.000,00	Rp 615.000.000,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan
2.08.2.02.01.21	Peningkatan Pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB		Sasaran Kab. Lamandau	DP3AP2KB	Persentase Peningkatan balai penyuluh KB dan Pembangunan Keluarga	100%	Jumlah pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB (Bulan)	12	Terlaksananya pengelolaan balai penyuluh KB dan Kampung KB	12	Rp 2.400.088.000,00	Rp 2.460.090.200,00	DP3AP2KB	Sedang Berjalan

Jumlah Program :
9 Program
Jumlah Kegiatan : 35 Kegiatan

